

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata

1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata
Triwulan I Tahun 2026**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I 2026	Realisasi s.d Triwulan I 2026	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan					
1.1	Indikator 1.1 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Jumlah Perjalanan (juta)	1.200	297,99	319,51	107,2
1.2	Indikator 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan (juta)	17-18	3,659	3,436	93,91
1.3	Indikator 1.3 Persentase Penyelesaian Konsep Muatan Substansi Tata Kelola Program IQTF	Persentase	100	20	20	100
II	Sasaran Program 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Persentase	80	30	30	100
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata					

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I 2026	Realisasi s.d Triwulan I 2026	Capaian (%)
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	-	-	-
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata	Persentase	92	23	23	100

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program 1: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan menjadi dua indikator kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara
2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
3. Persentase Penyelesaian Konsep Muatan Substansi Tata Kelola Program IQTF

1.1. Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara

Latar Belakang

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) adalah jumlah perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia ke destinasi di dalam wilayah Indonesia untuk keperluan wisata, rekreasi, atau kegiatan pribadi lainnya di luar rutinitas sehari-hari dalam kurun waktu tertentu. Kunjungan tersebut tidak termasuk perjalanan yang bertujuan untuk bekerja sebagai aktivitas utama, bersekolah atau menempuh pendidikan formal, serta tidak dimaksudkan untuk berpindah domisili.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator tersebut, diperlukan penguatan berbagai program yang mampu mendorong peningkatan mobilitas dan kunjungan wisatawan nusantara. Program dimaksud meliputi pembenahan ekosistem penyelenggaraan event untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan di berbagai daerah; pengembangan sumber daya manusia pariwisata guna meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing destinasi; implementasi asuransi pariwisata untuk memberikan perlindungan serta meningkatkan rasa aman bagi wisatawan; serta pengembangan sport tourism sebagai daya tarik yang dapat mendorong perjalanan wisata berbasis kegiatan olahraga. Pelaksanaan program-program tersebut diharapkan dapat memperkuat daya tarik destinasi, meningkatkan kepercayaan wisatawan, serta memperluas pergerakan wisatawan nusantara ke berbagai wilayah di Indonesia.

Indikator ini penting sebagai cerminan perkembangan sektor pariwisata domestik yang digerakkan oleh wisatawan nusantara, termasuk memahami minat dan preferensi wisatawan nusantara dalam menjelajahi, mengenal, dan menikmati keragaman destinasi serta potensi wisata yang tersebar di Indonesia.

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam kegiatan pariwisata domestik. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dapat mencerminkan minat dan daya beli masyarakat terhadap produk dan jasa wisata di dalam negeri, serta memberikan gambaran mengenai distribusi dan potensi ekonomi pariwisata antarwilayah. Minat dan daya beli masyarakat terhadap produk dan jasa wisata di dalam negeri dapat menjadi acuan untuk merencanakan dan menetapkan target pembangunan khususnya pada sektor pariwisata

Hasil Pengukuran Kinerja

Jumlah perjalanan Wisatawan Nusantara diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbaharui setiap 3 bulan (triwulan). Total Perhitungan jumlah perjalanan Wisatawan Nusantara pada Triwulan I dihitung selama periode Januari s.d Maret tahun berjalan. Adapun rincian Realisasi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara hingga TW I 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.1 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Jumlah Perjalanan (juta)	1.200	297,99	319,51	107,2

Pada TW I telah tercapai 107,2% yang didukung oleh adanya sejumlah hari libur nasional dan keagamaan (Tahun Baru Imlek 16-17 Februari dan Idul Fitri 18-24 Maret). Membaiknya infrastruktur pariwisata, pelaksanaan event di musim liburan, serta adanya paket wisata yang menarik juga terus mendorong pergerakan wisnus.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator 1.1 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1	Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait Digitalisasi Layanan Perizinan Event	Terlaksana	1. Pelaksanaan Rapat terkait Hosting fee Event Internasional pada 15 Januari 2026 2. Audiensi Bali Regalias Nusantara 12 Januari 2026 3. Rapat stimulus diskon transportasi pada 30 Januari 2026 4. Audiensi Resvvara (penyelenggara event sport tourism) pada 2 Maret 2026
2	Pengumpulan data dan informasi terkait Pembenahan Digitalisasi Layanan Perizinan Event	Terlaksana	Data Event PT JRP Periode Mudik Lebaran 2026 tanggal 27 Februari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja adalah pelaksanaan Rapat terkait Asuransi Pariwisata pada Tanggal 12, 22, 26, 28 Januari 2026 sebagai bentuk persiapan penyelenggaraan Pilot Project ekosistem Asuransi Pariwisata yang akan diselenggarakan untuk destinasi pariwisata prioritas Labuan Bajo.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan I tahun 2026 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pengembangan destinasi pariwisata sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang dilakukan pada triwulan ini. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi pada setiap rencana aksi yaitu adanya tekanan ekonomi makro yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya biaya perjalanan wisata domestik.

Berdasarkan kendala tersebut dan capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Kebijakan Insentif untuk mendorong kegiatan pariwisata pada musim libur panjang;
2. Pelaksanaan event di destinasi pariwisata untuk meningkatkan daya tarik.

1.2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Latar Belakang

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara adalah Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) adalah jumlah orang asing yang melakukan perjalanan ke suatu negara lain (dalam hal ini Indonesia) untuk tujuan wisata, yang tidak terkait dengan pekerjaan atau pendidikan, dan berlangsung kurang dari enam bulan.

Indikator jumlah kunjungan wisatawan wisman memiliki fungsi strategis sebagai salah satu tolok ukur kinerja sektor pariwisata nasional. Data ini tidak hanya mencerminkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata global, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Semakin tinggi angka kunjungan wisman, maka semakin besar pula potensi pemasukan devisa negara dan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui sektor pariwisata.

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator ini, program kerja Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata berfokus pada peningkatan konektivitas dan aksesibilitas destinasi pariwisata, terutama destinasi wisata prioritas dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata yang memiliki potensi besar dalam menarik minat wisatawan mancanegara.

Indikator jumlah kunjungan wisman digunakan untuk melihat performa pariwisata internasional Indonesia dan sebagai cerminan daya tarik destinasi wisata Indonesia di mata global. Data kunjungan ini juga menjadi acuan penting dalam mengevaluasi kebijakan konektivitas dan aksesibilitas pariwisata.

Hasil Pengukuran Kinerja

Jumlah perjalanan Wisatawan Nusantara diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbaharui setiap 3 bulan (triwulan). Total Perhitungan jumlah perjalanan Wisatawan Nusantara pada Triwulan I dihitung selama periode Januari s.d Maret tahun berjalan. Adapun rincian Realisasi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara hingga TW I 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan (juta)	17-18	3,659	3,436	93,91

Capaian TW I mencapai 95,75% dan diproyeksikan mencapai 106,37% dengan proyeksi realisasi sebesar 15,53 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Didukung dengan adanya peningkatan *daily flight* maskapai Citilink dari 5 menjadi 7 kali per minggu dari dan menuju Belitung. Peningkatan tersebut juga berdampak pada penurunan harga tiket dari dan menuju Belitung. Maskapai internasional Scoot akan mulai

beroperasi pada Mei 2026 untuk melayani *direct flight* Singapura - Belitung (pp).

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelarasan Arah Kebijakan dan Program Tahun 2026 dengan seluruh Eselon I Kementerian Pariwisata pada 30 Januari 2026
2.	Pengumpulan data dan informasi terkait Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rakor Dampak Situasi Timur Tengah terhadap Pariwisata Indonesia pada 9 Maret 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja adalah dengan

1. Mengikuti Rapat Koordinasi Finalisasi Kajian Dampak Ekonomi MotoGP Mandalika 2025 yang diselenggarakan oleh Bappenas pada 26 Januari 2026 sebagai bentuk evaluasi atas penyelenggaraan event internasional untuk menarik minat wisatawan mancanegara;
2. Mengikuti rapat stimulus diskon transportasi dan skema Work From Anywhere (WFA) periode lebaran idul fitri 2026 pada 27 Januari, 30 Januari, dan 6 Februari 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan I tahun 2026 adalah rapat di dalam kantor dalam penyelenggaraan rakor. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan ini. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi pada setiap rencana aksi yaitu:

1. Ego sektoral dan perbedaan kepentingan antarinstansi, sehingga proses penyelarasan kebijakan belum selalu berjalan optimal;
2. Kondisi geopolitik global, khususnya situasi di Timur Tengah, dapat memengaruhi pola perjalanan, konektivitas penerbangan, dan daya beli wisatawan.

Berdasarkan kendala tersebut dan capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai adalah dengan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pengelola destinasi dalam penyusunan program yang lebih terintegrasi.

1.3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata

Latar Belakang

Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; dan (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Pariwisata; (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Isu strategis terkait bidang pembiayaan pengembangan pariwisata mencakup penyusunan draf regulasi tentang Dana Pariwisata Berkualitas (DPB).

Persentase keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan bidang pembiayaan pengembangan pariwisata dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :

- a. Tahap 4, rentang persentase 72,5 – 100%
- b. Tahap 3, rentang persentase 46 – 72,5%
- c. Tahap 2, rentang persentase 21 – 45%
- d. Tahap 1, rentang persentase 0 – 20%

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata diukur dari realisasi pelaksanaan sudah sampai tahap yang mana. Adapun rincian Realisasi Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata hingga TW I 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata	Persentase	100	20	20	100

Realisasi TW I 2026 menunjukkan bahwa saat ini keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang pembiayaan pengembangan pariwisata masuk dalam Tahap 1, yaitu Perencanaan Kebijakan. Realisasi 20% mengindikasikan terselesaikannya Tahap 1, melalui pembahasan dan koordinasi penyusunan RPerpres tentang Dana Pariwisata Berkualitas.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 1.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait muatan substansi tata kelola program IQTF	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1 pada tanggal 30 Januari 2026 untuk membahas perubahan muatan substansi terkait pemanfaatan Dana Program
2	Pengumpulan data dan informasi terkait muatan substansi tata kelola program IQTF	Terlaksana	Telah dilaksanakan diskusi bilateral dengan Kemenpar untuk membahas mengenai perbandingan draf hasil Harmonisasi dan draf final

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja adalah dengan penyampaian surat Menko Perekonomian kepada Presiden nomor T/PH.02.01/41/M.EKON/02/2026 perihal Permohonan Penetapan RPerpres tentang Dana Pariwisata

Berkualitas pada tanggal 13 Februari 2026, dikirimkan surat Menko Perekonomian.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan I tahun 2026 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi dan diskusi terkait isu-isu strategis pariwisata di sektor pariwisata sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan ini. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi pada setiap rencana aksi adalah terdapatnya ketidaksamaan pemahaman antar K/L atas konsep kelembagaan IQTF.

Berdasarkan kendala tersebut dan capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan melakukan koordinasi dan diskusi rutin untuk membahas lebih dalam mengenai konsep pemanfaatan Dana Program IQTF.

2

Sasaran Program 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Latar Belakang

Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan

nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; dan (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Pariwisata; (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Persentase Efektivitas SKP di lingkup Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata adalah:

1. Regulasi mengenai Badan Otorita Pariwisata
2. Regulasi mengenai Tugas dan Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur

Persentase keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan tata kelola destinasi pariwisata dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :

- a. Tahap 4, rentang persentase 72,5 – 100%
- b. Tahap 3, rentang persentase 46 – 72,5%
- c. Tahap 2, rentang persentase 21 – 45%
- d. Tahap 1, rentang persentase 0 – 20%

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata diukur dari realisasi pelaksanaan sudah sampai tahap yang mana. Adapun rincian Realisasi Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata hingga TW I 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I	Realisasi	% Kinerja
IKU 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Persentase	80	30	30	100

Realisasi TW I 2026 menunjukkan bahwa saat ini keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan tata kelola destinasi pariwisata masuk dalam awal Tahap 2, yaitu Penyusunan Alternatif Kebijakan dengan realisasi capaian sebesar 30%. Pada tahap

tersebut, unit kerja telah menyelenggarakan pembahasan dan koordinasi penyusunan rancangan MoU pemanfaatan 4 candi yang melibatkan 4 K/L pusat dan 2 Pemda serta melakukan koordinasi dengan Bappenas dan BUMN terkait terkait peluang pendampingan teknis dan pembiayaan dari ADB untuk pengembangan pariwisata di Indonesia.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

<i>IKU 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata</i>			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait tata kelola destinasi pariwisata	Terlaksana	a) Menyelenggarakan pembahasan dan koordinasi penyusunan rancangan MoU pemanfaatan 4 candi yang melibatkan 4 K/L pusat dan 2 Pemda pada 24 Februari 2026 b) Melaksanakan Konsultasi publik Penyusunan Rancangan Permenko Tata Kelola Candi Borobudur pada 10 Februari 2026
2	Pengumpulan data dan informasi terkait tata kelola destinasi pariwisata	Terlaksana	Menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi RIDPN dan menyampaikan hasil pelaksanaan rencana aksi Kemenko perekonomian pada tahapan sebelumnya

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja adalah dengan menghadiri Rapat Koordinasi Geopark dalam rangka pemetaan isu dan potensi untuk optimalisasi pengembangan Geopark pada 9 Februari 2026.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil berupa teridentifikasinya berbagai permasalahan, tantangan, dan potensi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pencapaian indikator sektor pariwisata pada 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan I

tahun 2026 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan diskusi teknis terkait tata kelola destinasi pariwisata sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan ini. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi pada setiap rencana aksi adalah:

- a) Adanya perubahan struktur organisasi dan mutasi pegawai K/L terlibat yang incharge sebagai pihak terlibat dalam MoU sehingga perlu waktu kembali untuk menyamakan pemahaman;
- b) Bluebook 2026-2029 telah ditetapkan dan belum tahu kapan akan dibuka kembali, sehingga jenis pembiayaan sovereign loan belum dapat dilakukan. ADB disarankan untuk dapat berkoordinasi ke BUMN terkait agar dapat melakukan pendampingan teknis.

Berdasarkan kendala tersebut dan capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai adalah dengan:

- a) Mendorong percepatan penandatanganan PKS dan MoU;
- b) Melakukan rapat bilateral pada K/L yang bertindak sebagai pihak terkait untuk menyamakan pemahaman;
- c) Melakukan rapat koordinasi yang melibatkan ADB dan BUMN serta menjaring informasi yang terkumpul pada rapat tersebut.

3

Sasaran Program 3: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata

Latar Belakang

Terwujudnya Layanan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata yang Berkualitas berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan pariwisata; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pengembangan

pariwisata; (c) pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pengembangan pariwisata; (d) pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain terkait bidang pengembangan pariwisata; (e) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan pariwisata. Sasaran Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata yang berkualitas dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik (sebagaimana penjabaran poin a hingga e), serta produk yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Pariwisata merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 4 Aspek yakni (1) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan; (2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan; (3) pengelolaan dan penanganan isu; (4) penyelesaian isu yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga; dan (5) pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh dua indikator yakni Indikator Proses dan Indikator Hasil. Survey ini terdiri 21 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP} = \frac{\Sigma \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target indeks kepuasan layanan SKP pada tahun 2026 adalah 3 dari 4. Penetapan target 2026 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asdep Pengembangan Pariwisata Tahun 2025.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Pariwisata pada tahun 2026 belum tersedia datanya, karena survei kepuasan layanan akan dilaksanakan pada Semester I Tahun 2026.

Adapun rincian Realisasi Indeks Kepuasan layanan SKP hingga TW I 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	N/A	N/A	N/A

Pada tahap pertama Semester 2 Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep Pengembangan Pariwisata tercatat sebesar 3,72 dari 4 dengan kategori memuaskan, atau telah mencapai 100% dari target. Survei dilakukan terhadap 20 responden dengan menggunakan 24 item survei. Pada tahap kedua Triwulan IV Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Asdep Pengembangan Pariwisata meningkat menjadi 3,91 dengan kategori memuaskan, atau tetap mencapai 130% dari target, dengan jumlah responden sebanyak 21 orang dan menggunakan instrumen survei yang sama. Berdasarkan hasil pengukuran tahap pertama dan tahap kedua, sigma rerata jawaban masing-masing item survei sebesar 84,73 sehingga bila dibagi dengan jumlah item survei didapat nilai akhir 3,72 (memuaskan).

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

<i>IKU 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata</i>			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1	Persiapan survei kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian di bidang pengembangan pariwisata semester I tahun 2026	Terlaksana	Telah dilakukan pemetaan stakeholder penerima layanan SKP unit keasdepan untuk pelaksanaan survey di Triwulan II (Semester 1)

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut: Telah dilaksanakan sosialisasi mekanisme pengisian survei kepuasan layanan setelah dilaksanakan rapat koordinasi lintas sektor.

Rencana Aksi dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan survei yang menggunakan Google Form. Pengelolaan tata persuratan secara digital juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis perkantoran.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, kendala utama dalam pencapaian target yang ditetapkan adalah calon responden yang telah teridentifikasi tidak semuanya mengisi survei layanan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian tahap 1 dan 2, sehingga dilakukan penyebaran survei diluar list calon responden yang awalnya direncanakan untuk memenuhi kuota minimal responden yang mengisi.

Berdasarkan kendala tersebut dan capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya adalah dari saran

4

Sasaran Program 4: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata

4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata

Latar Belakang

Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata yang Baik.

Tata kelola Asisten Deputi merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mendorong dan memacu terselenggaranya program keasdepan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, program keasdepan ditunjang dengan kegiatan administrasi tata kelola yang mana merupakan suatu proses kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang mempengaruhi pengelolaan suatu unit kegiatan. Untuk mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan internal yang efektif.

Nilai akhir akumulasi digunakan untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja eselon II.

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja Asdep Pengembangan Pariwisata Tahun 2026. Adapun target triwulan I 2026 sebesar 23% atau mencapai 4 paket dokumen. Pemilihan target ini

berdasarkan progres penyusunan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya dan juga berdasarkan tren-tren tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 23% atau mencapai 100% kinerja.

Adapun rincian Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata hingga TW I 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata	Persentase	92	23	23	100

Pada Triwulan I Tahun 2026, Asdep Pengembangan Pariwisata telah menyelesaikan penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU serta melakukan penyusunan Laporan Kinerja untuk Triwulan IV tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2026. Dalam rangka optimalisasi implementasi Srikandi, Asdep Pengembangan Pariwisata telah memproses naskah masuk dan naskah keluar melalui Srikandi secara optimal. Asdep Pengembangan Pariwisata juga telah melakukan monitoring capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan Dialog Kinerja dan penyusunan Sasaran Kinerja Tahun 2026. Selanjutnya Asdep Pengembangan Pariwisata telah melakukan optimalisasi pengelolaan data kinerja sistem kinerja Ekon-GO. Pelaporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Output melalui Aplikasi E-Monev.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan	Terlaksana	a) Rapat Persiapan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Evaluasi Struktur

	Manual IKU		Organisasi dan Tata Kerja tanggal 15 Januari 2026 b) Diskusi Pembahasan IKU Deputi Tahun 2026 tanggal 21 Januari 2026 c) Workshop Penguatan Kapasitas dan Keimanan SDM Deputi V dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2026 tanggal 11 Maret 2026
2	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I	Terlaksana	Sudah dilaksanakan penyusunan laporan kinerja triwulan 1 tahun 2026
3	Penyusunan Renja 2027	Terlaksana	Sudah dilakukan pembahasan awal terkait Renja 2027
4	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI Triwulan I	Terlaksana	Semua surat masuk dan keluar dilakukan melalui SRIKANDI

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan berpartisipasi dalam sosialisasi terkait agen perubahan sebagai bentuk implementasi dari reformasi birokrasi

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya anggaran dengan terdapat tempat penyimpanan file berbasis cloud dengan pemberian akses dokumen yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja untuk meningkatkan kinerja, pengelolaan tata persuratan secara digital sebagai bentuk kemudahan akses bekerja, dilakukan lebih banyak koordinasi yang dilaksanakan secara daring/online sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat tercipta dengan baik pada DIPA Anggaran Kegiatan Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 belum ada kendala dalam pelaksanaan RB. Terdapat beberapa penyesuaian dan rencana aksi untuk mencapai target agar memberikan kinerja yang baik dan menciptakan reformasi birokrasi yang memuaskan.

Berdasarkan capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dilaksanakannya rapat koordinasi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan sumber daya yang maksimal untuk menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan kinerja.

Jakarta, 10 Juli 2026

Asisten Deputi Pengembangan
Pariwisata

\$(ttd_pengirim)

Herfan Brilianto Mursabdo